

ANALISIS BANTUAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN)

Tinneke Meiske Tumbel

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Upaya peningkatan daya guna dan hasil guna bantuan pembangunan desa telah mendorong bahkan menggerakkan swadaya gotong royong serta menumbuhkan otoaktivitas masyarakat dalam pembangunan desa. Bantuan ini sangat penting dan bermanfaat untuk pembangunan termasuk di Sulawesi Utara, khususnya desa-desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Ternyata rangsangan riil telah membawa dampak positif bagi masyarakat desa, terutama dalam hal memobilisasi potensi desa, seperti dana, tenaga, dan pikiran yang dimiliki masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis variabel dana bantuan, peran camat, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan tergolong pada penelitian survei. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data primer digunakan alat, yaitu pertanyaan. Cara pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan teknik wawancara di setiap desa yang telah ditentukan, sedangkan untuk data sekunder diambil melalui dokumen atau informasi dari kantor terkait. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dana bantuan dan pembangunan desa digunakan teknik analisis Chi Kuadrat, dan untuk mengukur besarnya derajat hubungan antara variabel digunakan rumus Koefisien Kontingensi. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor bantuan desa dan pembangunan desa terdapat hubungan yang signifikan. Setelah dihitung dari persentase bantuan desa, ternyata lebih banyak menilai baik atau memilih adanya manfaat terhadap pembangunan desa. Demikian juga, adanya derajat hubungan antara pembangunan desa dan peran camat setelah dihitung nilai maksimum koefisiensi kontingensi. Pada hakikatnya bantuan desa dengan pelaksanaan pembangunan desa mempunyai hubungan yang erat. Jadi, jika bantuan desa meningkat maka kualitas pembangunan desa pun akan meningkat.

Kata kunci: *bantuan desa, pembangunan desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, semata-mata ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan tingkat pusat dan implementasi kebijaksanaan tersebut tampak dari berbagai kebijaksanaan di Tingkat Propinsi, Kabupaten Daerah Tingkat II, sampai ke Kecamatan dan Desa. Sisi lain yang berperan, yakni komponen masyarakat dengan tingkat kesadaran akan partisipasi masyarakat, berupa dana, tenaga, dan pikiran yang secara konkret membangun desa.

Dalam pola pembangunan desa ditegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam hal memberikan bimbingan, dan desa memberikan partisipasinya. Mulianto dalam Ibnu Syamsi (1989:112) menjelaskan pembangunan masyarakat desa menghendaki kesadaran dan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam proses input sebagai artikulator dan aspirasi yang timbul dan hidup di dalam masyarakat dan ikut serta menentukan arah pembangunan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Desa kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Kelurahan/Desa; Juncto Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 7 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa antara lain ditetapkan: melakukan upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan bantuan pembangunan desa agar dapat mendorong menggerakkan swadaya gotong royong serta menumbuhkan otonomitas masyarakat dalam pembangunan desanya. Instruksi tersebut memberi petunjuk tentang peran pemerintah yang sebelumnya terbatas pada usaha-usaha membimbing dan menggerakkan, kini bergeser pada kegiatan memberi bantuan dana kepada setiap kelurahan/desa, selain bermaksud membangun desa secara riil berupa program dan proyek produktif, yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bantuan desa memberi kontribusi dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana peran camat memberi kontribusi dalam pembangunan desa?

Apakah partisipasi masyarakat dapat memberi sumbangan dalam pembangunan desa? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bantuan desa, dalam pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui hubungan peran camat terhadap pembangunan desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

Dengan demikian manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Memberi sumbangan untuk administrasi pembangunan desa terkait dengan intensitas dana bantuan desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bantuan desa untuk pembangunan desa.

3. Untuk melatih kepekaan masyarakat terhadap proses pengetahuan manajerial dana bantuan desa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.

Kebijaksanaan Penggunaan Bantuan Desa dan Pembangunan Desa

Berkaitan dengan upaya mengetahui arti kebijaksanaan, maka dikemukakan beberapa pendapat para ahli, antara lain: Stoner dan Wankel (1986:142) memberi arti kebijaksanaan sebagai suatu pedoman umum dalam pengambilan keputusan; ia menentukan batas-batas sekitar keputusan, termasuk keputusan yang dapat diambil dan menolak keputusan yang dapat diambil Hoogerwerf (1983:4), berpendapat bahwa kebijakan/policy sebagai semacam jawaban terhadap suatu masalah dan merupakan suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah tertentu.

Menurut para ahli Ilmu Kebijakan, secara teoretik bahwa menghadapi upaya menetapkan suatu kebijakan perlu secara dini mengetahui permasalahannya yaitu lasim disebut permasalahan kebijaksanaan. E.S Quade (1977:45-50). Pengetahuan ini bias diperoleh melalui penyelidikan atau dengan menggunakan metode penelitian, sehingga secara cermat dapat menghasilkan tipe informasi yang saling berkait, yaitu masalah kebijaksanaan, pilihan kebijaksanaan, tindakan kebijaksanaan, hasil kebijaksanaan, dan masalah hasil guna kebijaksanaan menurut William Dunn (1988:59-62).

Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

Analisis kebijaksanaan ini tidak hanya meminta analisis yang mengakibatkan tahap-tahap prospektif, tetapi juga menuntut analisis secara ajeg menghasilkan dan memindahkan informasi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, analisis melakukan transformasi komponen-komponen informasi kebijaksanaan menurut arah jarum jam sebelum dapat kepastian mengenai pemecahan masalah kebijakan ditemukan. Jelasnya analisis kebijaksanaan ini bersifat terus-menerus dan tidak terbatas. Sedangkan, E.S Quade (1977:21-28) mempunyai pendapat lain, ia membagi bentuk-bentuk analisis kebijaksanaan atas 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Operation research; menggunakan metode ilmiah untuk membantu pengambil keputusan dalam mencapai sumber-sumber paling tersedia.
- b. Analisis sistem; merupakan perubahan sistematis membantu mengambil keputusan memiliki rangkaian tindakan dengan menyelidiki masalah, mencari sasaran alternatif, serta membandingkannya.

- c. Analisis efektivitas biaya; merupakan salah satu bentuk analisis sistem, di mana sistem atau tidak alternatif yang diperkirakan dibandingkan dari dua konsekuensi yaitu biaya, sumber dan efektivitas) dengan alternatif masing-masing.
- d. Analisis laba rugi; salah satu kemungkinan pemikiran di antara program yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas yang berbeda ialah yang mengukur laba dan biaya di dalam unit-unit serupa pada suatu program.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Melalui peran dan kemampuan camat, kepala-kepala desa dan partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Tareran, maka pembangunan di desa-desa dalam wilayah pemerintahannya kelihatan cukup maju.. Menurut Irawan dan Suparmoko hal-hal yang bersifat peran pemerintah dalam inisiatif dan memajukan perekonomian adalah berkaitan dengan lingkungan sosial, perkembangan ekonomi, keadaan politik, tersedianya kemampuan manajemen, efisiensi administrasi pembangunan. Elemen ini merupakan kegiatan yang mengandung harapan hasil yang paling efektif sekaligus tidak terkecuali menjadi sasaran bagi pembangunan sebagai bantuan utama bagi masyarakat pedesaan. Tujuan utama bantuan desa ini selain melakukan pembangunan fisik secara riil di desa-desa, aspek penting lainnya adalah merangsang swadaya gotong royong dan otonomitas masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dalam wujud (uang), tenaga kerja, dan pikiran, menurut Yansen TP agar masyarakat desa memiliki kreatifitas, inisiatif, dan inovasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah Kecamatan Tareran Kabupaten Daerah Tingkat II - Minahasa Selatan, dari 13 desa formal yang ada, dan dari sejumlah kepala keluarga yang ada, serta tiap desa diacak sebesar 5%. Setelah dihitung sampel diperoleh 195. Namun untuk mendapatkan data primer dilakukan acak atas ke 13 Desa, Tumulung, Tumulung Satu dan Desa Koreng masing-masing ditentukan 50 responden, sehingga sampel penelitian berjumlah 150.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : kuesioner, wawancara, dan memanfaatkan dokumentasi. Kelaziman pengumpulan data penelitian ini dikenal sebagai teknik observasi dan teknik survei.

Melihat judul penelitian ini dan bersumber dari hipotesis yang telah diajukan, maka variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: pembangunan desa sebagai

variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi; variabel-variabel dana bantuan, peran camat dan partisipasi masyarakat adalah **variabel bebas** atau variabel yang mempengaruhi.

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dana bantuan dan pembangunan desa, dipakai teknik analisis **Chi Kuadrat** dengan rumus:

$$X^2 = \sum \frac{(F_o - F_h)^2}{F_h} \quad (\text{Sugiyono, 2007}).$$

Untuk mengukur besarnya derajat hubungan antara variabel digunakan rumus Koefisien Kontingensi sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X + N}} \quad (\text{Sugiyono, 2007}).$$

Nilai C maksimum digunakan:

$$C_{\max} = \sqrt{\frac{m - 1}{m}}$$

Di samping teknik analisis di atas, digunakan juga analisis persentase (%) yang bersumber pada data tabel (f_o). Aturan keputusan penerimaan hipotesis:

Hipotesis yang diuji dinyatakan teruji/diterima jika hasil-hasil yang diperoleh adalah signifikan pada 0.01 atau 0,05.

HASIL PENELITIAN

Hubungan antara Faktor Pembangunan Desa dengan Dana Bantuan

Tabel 1. Hubungan Pembangunan Desa dan Dana Bantuan dalam f_o dan f_h

Pembangunan Desa	Dana Bantuan			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	37 (31,28)	19 (19,04)	12 (17,68)	68
Kurang Baik	26 (23,92)	16 (14,56)	10 (13,52)	52
Tidak Baik	6 (13,80)	7 (8,40)	17 (7,80)	30
Jumlah	69	42	39	150

Oleh karena $X^2_{\text{obs}} > X^2_{\text{hip}} 0,05$ df 4 signifikan, maka H_o yang menyatakan faktor pembangunan desa dan dana bantuan tidak ada hubungan (ditolak). Dengan demikian, menerima H_a yang menyatakan antara faktor pembangunan desa dan dana bantuan terdapat hubungan yang signifikan. Oleh karena, derajat hubungan koefisien kontingensi sebesar 0,3464 dan C_{\max} besarnya 0,8165, hal ini berarti derajat hubungan makin kecil ($\frac{1}{2}C_{\max}$), maka dapat dinyatakan bahwa tingkat asosiasinya rendah, walaupun demikian perbedaan tetap meyakinkan. Selanjutnya, untuk mengetahui persentase

hubungan antara faktor pembangunan desa dan dana bantuan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Hubungan Pembangunan Desa dan Dana Bantuan dalam Persentase (%)

Pembangunan Desa	Dana Bantuan			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	54,41	27,94	17,65	100
Kurang Baik	50	30,77	19,23	100
Tidak Baik	20	23,33	56,67	100

Sumber: Data Observasi (f_o).

Dari data tabel di atas dapat dikemukakan bahwa dari jumlah 68 orang yang menilai baik pembangunan desa, di mana terdapat 37 orang (54,41%); yang menilai kurang baik 19 orang (27,94%), sedangkan yang menilai tidak baik 12 orang (17,65%). Kemudian, dari jumlah 52 orang yang menilai kurang baik ada 26 orang (50%) yang menyatakan baik, 16 orang (30,77%) yang menyatakan kurang baik, sedangkan 10 orang (19,23%) yang menyatakan tidak baik. Kesimpulan bahwa dari jumlah 68 orang (45,34%) yang menilai pembangunan desa baik, dan 52 orang (34,66%) yang menilai kurang baik, serta 30 orang (20%) yang menilai tidak baik. Ada kecenderungan mereka menyatakan tidak baik, karena tidak mengetahui adanya manfaat dana bantuan pembangunan desa.

Hubungan antara Pembangunan Desa dan Peran Camat

Tabel 3. Hubungan Pembangunan Desa dan Peran Camat dalam f_o dan f_h

Pembangunan Desa	Peran Camat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	41 (34,07)	22 (22,39)	10 (16,55)	73
Kurang Baik	23 (23,80)	17 (15,64)	11 (11,56)	51
Tidak Baik	6 (12,13)	7 (7,97)	13 (5,89)	26
Jumlah	70	46	34	150

Besarnya derajat hubungan adalah 0,3105 sedang nilai maksimum hubungan antara pembangunan desa dan peran camat sebesar 0,8165. Hal ini berarti mendekati $\frac{1}{2}C_{\max}$ yang menyatakan derajat hubungannya sedang, namun hubungan tetap meyakinkan. Untuk mengetahui persentase hubungan antara faktor pembangunan desa dan peran camat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hubungan Pembangunan Desa dan Peran Camat dalam Persentase (%)

Pembangunan Desa	Peran Camat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	54,41	27,94	17,65	100
Kurang Baik	50	30,77	19,23	100
Tidak Baik	20	23,33	56,67	100

Dari data tabel 3 dan tabel 4, maka dapatlah dijelaskan bahwa dari 73 orang yang menyatakan pembangunan desa baik, dan ada 41 orang (56,16%) yang menyatakan baik, 22 orang (30,14%) yang menyatakan kurang baik serta ada 10 orang (13,70%) yang menyatakan tidak baik. Sedangkan dari 51 orang yang menyatakan pembangunan desa kurang baik, terdapat 23 orang (45,10%) yang menyatakan baik, dan 11 orang (21,57 %) yang menyatakan tidak baik. Dari 26 orang yang menyatakan pembangunan desa tidak baik, terdapat 6 orang (23,08 %) yang menyatakan baik, dan 7 orang (26,92 %) yang menyatakan kurang baik, serta 13 orang (50 %) yang menyatakan tidak baik. Kesimpulan yang dapat diambil ialah mereka yang menyatakan pembangunan desa tidak baik adalah mereka yang tidak mengetahui arti pembangunan desa, baik untuk diri pribadinya maupun untuk masyarakat desa umumnya.

Hubungan antara Faktor Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat

Tabel 5. Hubungan Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam f_o dan f_h

Pembangunan Desa	Partisipasi Masyarakat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	34 (29,03)	22 (20,55)	11 (17,42)	67
Kurang Baik	25 (22,97)	17 (16,25)	11 (13,78)	53
Tidak Baik	6 (13,00)	7 (9,20)	17 (9,80)	30
Jumlah	65	46	39	150

Oleh karena itu $X^2_{obs} > X^2_{hip}$ 0,005 d_f 4 signifikan, maka h_o dinyatakan ditolak, dan menerima h_a yang dinyatakan bahwa faktor-faktor pembangunan desa dan partisipasi masyarakat terdapat hubungan yang signifikan. Nilai maksimum koefisien kontingensi adalah $C_{max} = 0,8165$. Dan $C = 0,3387$. Hal ini berarti mendekati $\frac{1}{2} C_{max}$. Kondisi ini menunjukan hubungan antara faktor pembangunan desa dan partisipasi masyarakat sedang, namun tetap signifikan. Untuk mengetahui besarnya persentase hubungan antara pembangunan desa dan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

Tabel 6. Hubungan Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Persentase (%)

Pembangunan Desa	Partisipasi Masyarakat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	50,75	32,84	16,41	100
Kurang Baik	47,17	20,08	20,75	100
Tidak Baik	20,00	23,33	56,67	100

Sumber: Data Observasi (f_o)

Dari data tabel 5 dan tabel 6 di atas ini, maka dapatlah dikemukakan bahwa dari 67 orang yang mengatakan pembangunan desa baik, ada 34 orang (50,75%) yang mengatakan baik, dan 11 orang (16,14%) yang mengatakan kurang baik, serta ada 17 orang (32,84%) yang mengatakan tidak baik. Kemudian dari 53 orang yang mengatakan kurang baik, terdapat 25 orang (47,17%) yang mengatakan baik, dan 17 orang (20,08%) yang mengatakan kurang baik, serta 11 orang (20,75%) yang mengatakan tidak baik. Sedangkan, dari 30 orang yang mengatakan tidak baik, terdapat 6 orang (20,00%) yang mengatakan baik, dan 7 orang (23,33%) yang mengatakan kurang baik, serta ada 17 orang (56,67%) yang mengatakan tidak baik. Sebagai kesimpulan, mereka yang mengatakan pembangunan desa tidak baik, karena mereka tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Hubungan antara Dana Bantuan dan Peran Camat

Tabel 7. Hubungan Dana Bantuan dan Peran Camat

Dana Bantuan	Peran Camat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	36 (31,28)	23 (19,78)	10 (17,48)	69
Kurang Baik	26 (24,03)	16 (15,19)	11 (13,43)	53
Tidak Baik	6 (12,26)	5 (8,03)	17 (7,09)	28
Jumlah	68	44	38	150

Nilai maksimum koefisien kontingensi (C) adalah 0,8165 karena nilai C mendekati $\frac{1}{2}$ C maksimum. Hal ini berarti hubungan antara dana bantuan dan peran camat dikategorikan sedang namun hubungannya tetap meyakinkan. Untuk mengetahui besarnya persentase hubungan derajat, dapat diikuti pada uraian berikut berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hubungan Dana Bantuan dan Peran Camat dalam Persentase (%)

Dana Bantuan	Peran Camat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	52,17	33,33	14,50	100
Kurang Baik	49,06	30,17	20,75	100
Tidak Baik	21,43	17,66	60,17	100

Sumber: Data Observasi (f_o)

Bersumber dari data tabel di atas, maka dapatlah dikemukakan dari 69 orang yang menilai dana bantuan baik, terdapat 36 orang (52,17%) yang menilai baik, dan ada 23 orang (33,33%) yang menilai kurang baik, serta ada 10 orang (14,50%) yang menilai tidak baik. Dari 53 orang menilai kurang baik, di mana terdapat 26 orang (49,06%) yang mengatakan kurang baik, serta ada 11 orang (29,75%) yang mengatakan tidak baik. Sedangkan, dari 38 orang yang menilai tidak baik, terdapat 6 orang (21,43%) yang mengatakan baik, dan ada 5 orang (17,86%) yang mengatakan kurang baik, serta ada 17 orang (60,71%) yang mengatakan tidak baik. Sebagai kesimpulan bahwa mereka yang mengatakan dana bantuan tidak baik adalah mereka yang berasumsi negatif terhadap peran camat dengan kebijaksanaan pemanfaatan dan bantuan pembangunan desa.

Hubungan antara Peran Camat dan Partisipasi Masyarakat

Tabel 9. Hubungan Peran Camat dan Partisipasi Masyarakat dalam f_o dan f_h

Peran Camat	Partisipasi Masyarakat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	33 (24,64)	21 (19,36)	12 (22,00)	66
Kurang Baik	17 (15,31)	14 (12,03)	10 (13,67)	41
Tidak Baik	6 (16,05)	9 (12,61)	28 (14,33)	43
Jumlah	56	44	50	150

Nilai maksimum sudah dihitung adalah 0,8165. Derajat hubungan (C) adalah 0,4050 mendekati $\frac{1}{2}$ C maksimum, di mana derajat hubungannya dikategorikan sedang, namun tetap meyakinkan. Untuk menghitung besarnya persentase hubungan antara peran camat dan partisipasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Hubungan Peran Camat dan Partisipasi Masyarakat dalam Persentase (%)

Peran Camat	Partisipasi Masyarakat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	50,00	31,82	18,18	100
Kurang Baik	41,46	34,15	23,39	100
Tidak Baik	13,95	20,93	65,12	100

Sumber: Data Observasi (f_o)

Dari data tabel di atas, terdeskripsi sebagai berikut dari 69 orang yang menilai, terdapat 33 orang (50,00 %) yang menilai baik, dan ada 21 orang (31,82 %) yang menilai kurang baik, serta ada 12 orang (18,18 %) yang menilai tidak baik. Selanjutnya, dari 41 orang yang menilai peran camat kurang baik, yaitu terdapat 17 orang (41,46 %) yang menilai peran camat adalah baik, dan ada 14 orang (34,15 %) yang menilai kurang baik, serta ada 10 orang (23,39 %) yang menilai tidak baik. Sedangkan, dari 43 orang yang menilai peran camat tidak baik terdapat 6 orang (13,95 %) yang menilai baik, dan ada 9 orang (20,93 %) yang menilai kurang baik, serta ada 28 orang (65,12 %) yang menilai tidak baik. Kesimpulannya bahwa mereka yang menilai peran camat tidak baik adalah mereka yang tidak berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Hubungan antara Dana Bantuan dan Partisipasi Masyarakat

Tabel 11. Hubungan Dana Bantuan dan Partisipasi Masyarakat dalam f_o dan f_h

Dana Bantuan	Partisipasi Masyarakat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	32 (29,00)	23 (20,50)	20 (25,50)	75
Kurang Baik	20 (15,08)	11 (10,66)	8 (13,26)	39
Tidak Baik	6 (13,92)	7 (9,84)	23 (12,24)	36
Jumlah	58	41	51	150

Nilai C maksimum sudah dihitung dan besarnya adalah 0,8165. Besarnya derajat hubungan adalah 0,3435 mendekati $\frac{1}{2}$ C maksimum, hal ini berarti derajat hubungannya dikategorikan sedang namun tetap meyakinkan.

Untuk mengetahui persentase antara dana bantuan dan partisipasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Hubungan Dana Bantuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Persentase (%)

Dana Bantuan	Partisipasi Masyarakat			Jumlah
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Baik	42,67	30,67	26,66	100
Kurang Baik	51,28	28,21	20,51	100
Tidak Baik	16,67	19,44	63,89	100

Sumber: Data Observasi (f_o)

Berangkat dari tabel di atas, dapatlah dikemukakan bahwa dari 75 orang yang menilai baik, terdapat 32 orang (42,67%) yang menilai baik, dan ada 23 orang (30,67 %) yang menilai kurang baik, serta ada 20 orang (26,66 %) yang menilai tidak baik. Selanjutnya, dari 39 orang yang menilai kurang baik, terdapat 20 orang (51,28 %) yang

menilai baik, dan ada 11 orang (28,21 %) yang menilai kurang baik, serta ada 8 orang (20,51 %) yang menilai tidak baik. Sedangkan, dari 36 orang yang menilai dana bantuan tidak baik, terdapat 6 orang (16,67 %) yang menilai baik, dan ada 7 orang (19,44 %) yang menilai kurang baik, serta ada 23 orang (63,89 %) yang menilai tidak baik. Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa mereka yang menilai dana bantuan tidak baik adalah mereka yang tidak berpartisipasi dalam pembangunan desa.

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini bahwa dana bantuan desa berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini ditunjukkan oleh 4 variabel:

- a. Pembangunan desa adalah sarana dan prasarana fisik atau sosial yang dibangun dengan dana bantuan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat desa.
- b. Peran camat; sebagai penguasa tunggal di tingkat Pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; mengaktifkan alokasi penggunaan dana bantuan pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa melalui LKMD, serta pengawasan atau metode dan prosedur yang berlaku.
- c. Dana bantuan pembangunan desa; sejumlah uang yang dialokasikan melalui Inpres untuk pembangunan desa yang berorientasi pada program yang produktif, ekonomis, sarana prasarana sosial bertujuan menggerakkan swadaya gotong-royong dan otaktivitas masyarakat berupa uang, tenaga dan pikiran dalam pembangunan desa.
- d. Partisipasi masyarakat desa; keikutsertaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok bertalian dengan potensi yang dimiliki mereka, berupa dana, tenaga kerja, dan pikiran secara sukarela di dalam pembangunan. Partisipasi ini dapat pula, berupa kerja sama secara nyata seperti saling membantu membuat jalan desa, saluran pembuangan air, dan prasarana sosial lainnya di desa. Selain itu, kerja sama membuat rumah secara bergilir, kebun sawah, ataupun kepentingan-kepentingan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka simpulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: bantuan desa mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan uji chisquare

dan analisis persentase maka secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap pembangunan desa. Hasil analisis data juga menunjukkan jika dilihat secara parsial masing-masing variabel bebas, maka yang paling dominan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat, sedangkan peran masyarakat yang sebelumnya diduga punya pengaruh yang dominan ternyata tidak terbukti, akan tetapi pengaruhnya masih signifikan.

Bagi masyarakat, pemanfaatan dana bantuan desa sebaiknya ditata dan dikelola seefektif dan seefisien mungkin, agar kualitas pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat dan dana bantuan hendaknya lebih diperhatikan sehingga kesejahteraan pun akan terdistribusi dengan merata.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan kapabilitas, kapasitas dan integritas serta bersikap lebih bijaksana menyalurkan dana bantuan yang dapat diserap oleh masyarakat secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn William N.1988. *Analisis Kebijaksanaan Publik*, terjemahan Muhadjir Darwis, Yogyakarta, Hemudita Offset.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Erlangga.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Jrawan, M. Suparmako. 2012. *Ekonomika Pembangunan* Edisi Keenam. BPFE-Yogyakarta.
- Quade, S.E. 1977. *Analysis for Public Decisions* New York, Elsevier.
- Stoner, F.A. dan Mankel Chooks. 1986. *Manajemen*. Terjemahan Bakomatun Wilhelmus.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Yansen. 2014. *Revolusi dari Desa*, Elex Media Komputindo.
- Sumber-sumber Lain:
- . 2012. *Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB PRESS
- . 1993/1994. *Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa*.
- . 1992/1993. *Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara*.